



LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2015



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Visi

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.



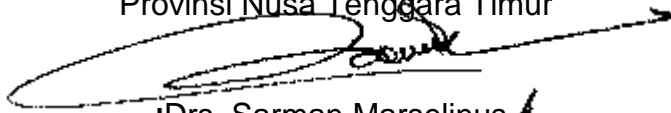
KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 ini dapat disusun dan diselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2015.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pembangunan.

Semoga Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang telah diberikan kepada Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masayang akan datang.

Kupang, 20 Januari 2016
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Sarman Marselinus

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Organisasi	2
C. Aspek Strategis	5
D. Permasalahan Utama	8
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai bentuk tanggung jawab atas capaian kinerja yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, berusaha untuk menyajikan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pengukuran-pengukuran terhadap indikator kinerja utama yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 memuat pencapaian kinerja terhadap 12 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 32 indikator kinerja utama. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 adalah sebesar 79,6% dengan kategori pencapaian adalah **Cukup**. Sedangkan realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama tahun 2015 adalah sebesar 79,10%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama memiliki kedudukan dan peran penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai amanat konstitusi. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila merupakan fundamen moral bernegara yang harus dimaknai lebih lanjut sebagai unsur yang harus berperan dan menjiwai arah dan tujuan pembangunan nasional yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bertujuan untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Kementerian Agama merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas untuk menata kehidupan umat beragama dalam sistem kehidupan nasional, serta bertanggung jawab untuk melakukan penataan dan pembinaan secara berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat yang beriman, cerdas, rukun dan sejahtera. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kementerian Agama dituntut untuk melaksanakan tugas di bidang agama dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam mewujudkan hal tersebut dan sesuai azas akuntabilitas, penyelenggara

negara harus dapat mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 3, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Demikian pula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perwakilan daripada Kementerian Agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, Kementerian Agama mengemban 2 (dua) tugas utama yaitu menangani pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan. Secara lebih khusus, pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

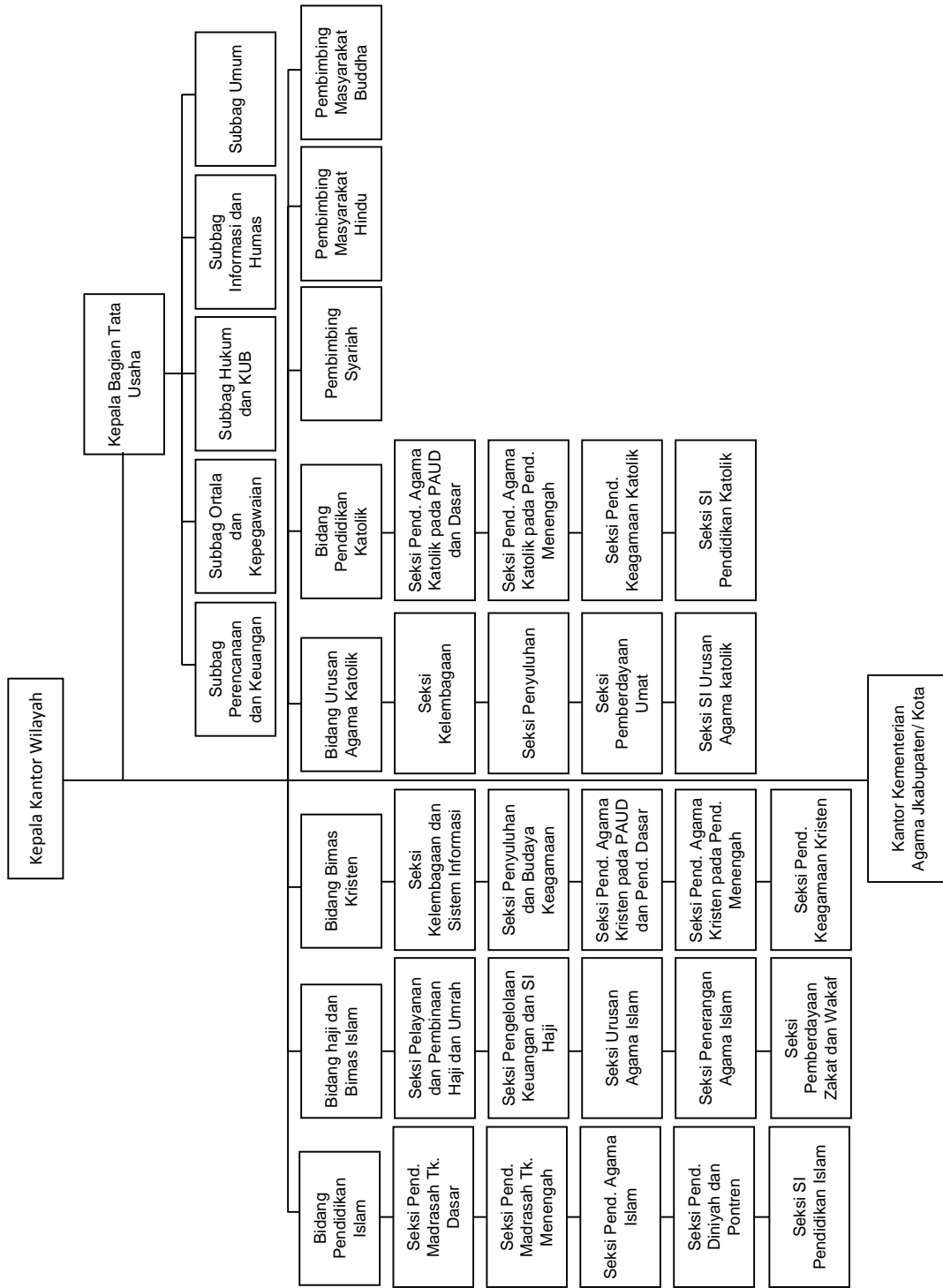
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan umat beragama kepada masyarakat;
- b) pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah;
- c) pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;

- d) pembinaan kerukunan umat beragama;
- e) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan
- g) pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh 1 Bagian Tata Usaha, 5 Bidang, 1 Pembimbing dan 2 Pembimas. Selain itu, untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kabupaten/ kota, telah terbentuk 19 satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Pada akhir tahun 2015, telah diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang pembentukan 33 satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang baru, dimana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat tambahan 3 satuan kerja baru. Bagan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat sebagai berikut :

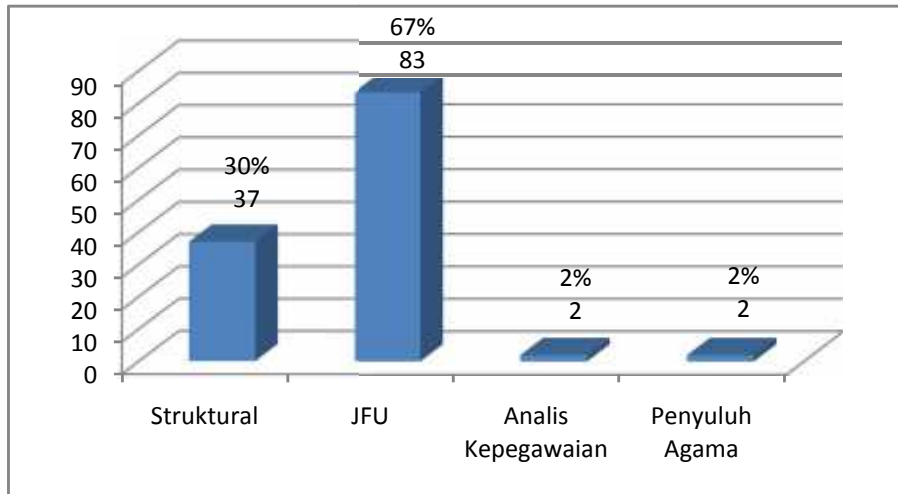
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



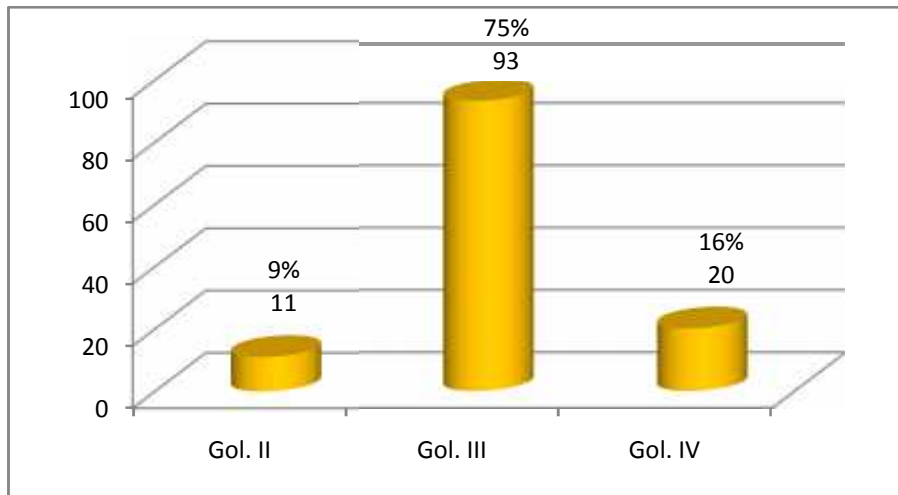
2. Profil SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama didukung oleh 124 orang pegawai yang tersebar pada 9 (sembilan) unit kerja eselon III, dengan statistik sebagai berikut:

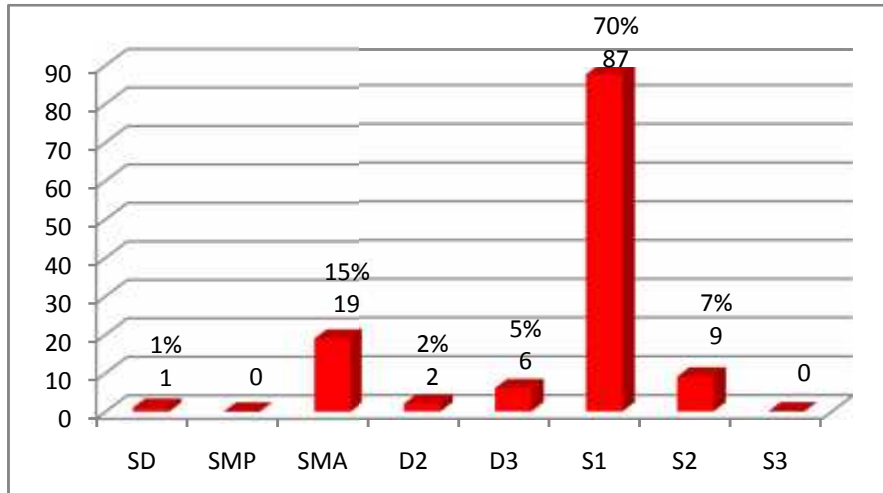
a. Berdasarkan Jabatan



b. Berdasarkan Golongan



c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



B. Aspek Strategis

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib mendukung program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam rangka menyukseskan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan visi **“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan misi, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua tujuan, yaitu tujuan pembangunan **bidang agama**, dan tujuan pembangunan **bidang pendidikan**, dengan sasaran masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan pembangunan bidang agama. Dalam menjalankan tugas tersebut terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang agama, yaitu:
 - a. peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan;
 - b. peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;

- d. peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
 - e. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel; dan
 - f. terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Tujuan pembangunan bidang pendidikan. Dalam menjalankan tugas tersebut terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang agama, yaitu:
- a. Peningkatan akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar;
 - b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi;
 - c. Pengurangan jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan;
 - d. Peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan ;
 - e. Peningkatan proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama;
 - f. Peningkatan proporsi guru agama yang profesional; dan
 - g. Peningkatan akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama.

Dari masing-masing sasaran strategis tersebut di atas, terdapat beberapa aspek strategis yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menjadi daya pendukung bagi tercapainya tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur :

1. Kehidupan Beragama

Yaitu peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan, peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, optimalisasi pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

2. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Oleh sebab itu salah satu aspek yang menjadi fokus prioritas adalah mewujudkan dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

3. Pendidikan RA, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pendidikan RA, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan merupakan pilar penting pembangunan pendidikan nasional, dalam rangka menghasilkan SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia.

4. Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu program prioritas pembangunan bidang agama dan seringkali diposisikan sebagai salah satu indikator kunci kinerja Kementerian Agama.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Yaitu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan memfokuskan pada 5 aspek, yaitu : (1) penataan organisasi; (2) peningkatan kualitas SDM; (3) peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN; (4) peningkatan program pengawasan dan akuntabilitas kinerja; dan (5) optimalisasi perencanaan program, pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan.

C. Permasalahan Utama

Memperhatikan pelaksanaan program dan tugas dengan kondisi yang obyektif, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Permasalahan-permasalahan ini yang menghambat pelaksanaan program dan tugas sehingga berdampak pada kurang optimalnya hasil yang dicapai. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya :

1. Masih terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional.
2. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, jika dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai.
3. Sebaran madrasah masih terkonsentrasi pada ibukota kecamatan/ kabupaten/ kota/ provinsi, sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkau seluruh wilayah.
4. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.
5. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
7. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh.

Ⓓ. Sistematika Pengajian

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 ini menginformasikan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ikhtisar eksekutif, yang berisi ringkasan secara menyeluruh tentang Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.
2. Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program strategis, permasalahan utama dan sistematika penyajian.
3. Bab II Perencanaan Kinerja, yang berisi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, yang berisi hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.
5. Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah pada masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
6. Lampiran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Langkah Strategis

Perencanaan adalah sebuah proses memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Dalam penyusunan perencanaan, dihasilkan sebuah komitmen yang akan dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Perencanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 bertepatan dengan penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 yang akan digunakan sebagai pijakan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Perencanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 diawali dengan penyusunan dokumen penetapan kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan yang didasarkan pada arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, diantaranya:

1. Perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama tahun 2015;
2. Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2015;

3. Pelaksanaan evaluasi program secara berkala, baik melalui sistem elektronik yang telah diterapkan, yaitu menggunakan aplikasi Elektronik Monitoring Pelaksanaan Program Anggaran (e-MPA) maupun rapat evaluasi setiap bulan;
4. Pencanaan dan penerapan 5 (lima) nilai budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kelima nilai budaya kerja tersebut menjadi spirit pegawai dan institusi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dan melayani.
5. Pelaksanaan assesmen pegawai sebagai upaya untuk pemetaan potensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

B. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.1/OT.01.1/4919b/2015 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan visi untuk Rencana Strategis 2015 – 2019 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

TAAT - memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga Masyarakat NTT yang taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap masyarakat NTT mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

RUKUN - memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur secara baik dan damai. Hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan.

CERDAS - mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut: Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (problem solving); Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain; Kecerdasan spiritual: yaitu memiliki mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agamanya, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

SEJAHTERA - mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan

batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Nusa Tenggara Timur dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Nusa Tenggara Timur. Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama.

2. Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah misi yang sama diemban Kementerian Agama secara nasional yakni:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan	1. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan; 2. Persentase lembaga keagamaan sosial yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	Persentase fasilitas sarana dan prasarana sekretariat bersama FKUB yang memenuhi standar.
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya; 2. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan.
4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	1. Dana zakat yang terhimpun; 2. Jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan minimal; 3. Persentase tanah wakaf bersertifikat.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima	Meningkatnya mutu/ kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien dan akuntabel	1. Jumlah jemaah haji yang dilayani; 2. Jumlah pembimbing haji yang bersertifikat.

Bab II Perencanaan Kinerja

6. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Persentase penyerapan anggaran 2. Persentase penyampaian dokumen LKKA tepat waktu dan tepat jumlah
	2. Meningkatkan pengelolaan BMN yang tertib	1. Persentase penyampaian dokumen laporan BMN tepat waktu dan tepat jumlah 2. Persentase Pengamanan aset BMN
	3. Meningkatkan tatakelola organisasi	1. Persentase penyelesaian TLHP temuan Itjen, BPKP, dan BPK 2. Persentase penurunan temuan oleh audit internal dan eksternal 3. Nilai Audit kinerja 4. Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat.
	4. Meningkatkan kualitas perencanaan, Sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien	1. Persentase perencanaan berbasis money Follow program 2. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu 3. Persentase capaian output pelaksanaan perencanaan 4. Peringkat pengelolaan majalah dinas 5. Peringkat pengelolaan Website
	5. Meningkatkan kualitas SDM dan tatakelola kepegawaian	Persentase implementasi update data kepegawaian secara rutin
	6. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang/jasa dan tata kelola dokumen	1. Persentase Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pengadaan barang dan jasa yang diajukan Pejabat Pembuat Komitmen 2. Persentase implementasi e-dokumen

Bab II Perencanaan Kinerja

7. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun)	Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah	1. Jumlah siswa MI/Ula yang diberikan KIP; 2. Jumlah siswa MTs/Wustha; 3. Jumlah siswa MA/Ulya.
8. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah tinggi	1. meningkatnya APK RA/ PAUD Kristen/ Taman Seminari; 2. meningkatnya APK MI/ Ula/ SDTK/SDAK; 3. meningkatnya APM MI/ Ulya/ SDTK/SDAK; 4. meningkatnya APK MTs/ Wustha/ SMPTK/ SMPAK; 5. meningkatnya APM MTs/ Wustha/ SMPTK/ SMPAK; 6. meningkatnya APK MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK; dan 7. meningkatnya APM MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK.
9. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun)	Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan	1. Angka putus sekolah MI/Ula; 2. Angka putus sekolah MTs / Wustha; 3. Angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK.
10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan	Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan	1. Persentase pendidikan RA yang terakreditasi minimal B 2. Persentase Pendidikan MI yang terakreditasi minimal B 3. Persentase MTs yang terakreditasi minimal B 4. Persentase MA yang terakreditasi minimal B 5. Rata-rata nilai ujian sekolah MTs/SMTK 6. Rata-rata nilai ujian sekolah MA/SMATK

Bab II Perencanaan Kinerja

11. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan	Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama	1. Presentasi guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 2. Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi
12. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat	1. Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat 2. Persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat 3. Persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat
13. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas	Meningkatnya Akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama	1. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam (Diniyah/Pesantren) 2. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen 3. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik 4. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha (SMB, Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma)

C. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Gambaran tentang Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Persentase penyerapan anggaran 2. Persentase penyampaian dokumen LKKA tepat waktu dan tepat jumlah	90 % 100 %
2.	Meningkatnya pengelolaan BMN yang tertib	1. Persentase penyampaian dokumen laporan BMN tepat waktu dan tepat jumlah 2. Persentase Pengamanan aset BMN	100 % 100 %
3.	Meningkatnya tatakelola organisasi	1. Persentase penyelesaian TLHP 2. Persentase penurunan temuan oleh audit internal dan eksternal 3. Nilai Audit kinerja 4. Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat.	75 % 50 % 75 100 %
4.	Meningkatnya kualitas perencanaan, Sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien	1. Persentase perencanaan berbasis money Follow program 2. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu 3. Persentase capaian output pelaksanaan perencanaan 4. Peringkat pengelolaan majalah dinas 5. Peringkat pengelolaan Website	100 % 100 % 90 % 7 10
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tatakelola kepegawaian	Persentase implementasi update data kepegawaian secara rutin	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang/jasa dan tata kelola dokumen	1. Persentase Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pengadaan barang dan jasa yang diajukan Pejabat Pembuat Komitmen 2. Persentase implementasi e-dokumen 3. Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia	100 % 100 % 100 %

Bab II Perencanaan Kinerja

7.	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan	1. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan; 2. Persentase lembaga keagamaan sosial yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.	614 orang 84 lembaga
8.	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	Persentase fasilitas sarana dan prasarana sekretariat bersama FKUB yang memenuhi standar.	80 %
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya; 2. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan.	71 lokasi 97 lokasi
10.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	1. Dana zakat yang terhimpun; 2. Jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan minimal; 3. Persentase tanah wakaf bersertifikat.	7 M 10 lembaga 90 %
11.	Meningkatnya mutu/ kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien dan akuntabel	1. Jumlah jemaah haji yang dilayani; 2. Jumlah pembimbing haji yang bersertifikat.	518 orang 4 orang
12.	Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah	1. Jumlah siswa MI/Ula yang diberikan KIP; 2. Jumlah siswa MTs/Wustha; 3. Jumlah siswa MA/Ulya.	10.083 siswa 3.157 siswa 2.305 siswa
13.	Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan	1. Angka putus sekolah MI/ULA; 2. Angka putus sekolah MTs / Wustha; 3. Angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK.	0,50 % 0,50 % 0,50 %
14.	Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan	1. Persentase pendidikan RA yang terakreditasi minimal B 2. Persentase Pendidikan MI yang terakreditasi minimal B 3. Persentase MTs yang terakreditasi minimal B 4. Persentase MA yang terakreditasi minimal B 5. Rata-rata nilai ujian sekolah MTs/SMTK 6. Rata-rata nilai ujian sekolah MA/SMATK	25 % 70 % 70 % 70 % 5,9 7
15.	Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama	1. Presentasi guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 2. Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi	100 % 50 %

Bab II Perencanaan Kinerja

16.	Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat	1. Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat 2. Persentase guru pendidikan agama kristen bersertifikat 3. Persentase guru pendidikan agama katolik bersertifikat	80 % 100 % 10 %
17.	Meningkatnya Akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama	1. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam (Diniyah/Pesantren) 2. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen 3. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik 4. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha (SMB, Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma)	6.000 siswa 2.000 siswa 245 siswa 10 siswa

Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 tersebut diimplementasikan dalam 9 (sembilan) program Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);

- d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
 - e. Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN);
 - f. Pembinaan Administrasi Umum; dan
 - g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan tata kelola pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan pada Kementerian Agama, khususnya dalam meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Agama melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang efektif. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah ketersediaan sarana dan prasarana melalui pengadaan-pengadaan.
3. Program Pendidikan Islam
- Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:
- a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/ BA dan Madrasah;
 - b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;
 - c. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;
 - d. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

4. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri
- b. Pembinaan Haji dan Umrah;
- c. Pengelolaan Dana Haji; dan
- d. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;

5. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
- c. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen; dan
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;

7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.

8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu;
- c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu; dan
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu.

9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
- b. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 telah menetapkan 17 Sasaran Strategis dan 48 Indikator Kinerja Utama. Pencapaian IKU dari sasaran tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015. Secara umum capaian IKU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian IKU
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2015

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Tertib Sesuai Dengan Ketentuan			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Persentase penyerapan anggaran	90 %	80,23 %	89 %
2. Persentase penyampaian dokumen LKKA tepat waktu dan tepat jumlah	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			94,5 %

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Pengelolaan BMN yang Tertib			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Persentase penyampaian dokumen laporan BMN tepat waktu dan tepat jumlah	100 %	100 %	100 %
2. Persentase Pengamanan aset BMN	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %
Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Tatakelola Organisasi			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Persentase penyelesaian TLHP	75 %	40 %	53,3 %
2. Nilai Audit kinerja	75	67,70	90,3 %
3. Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			74,7 %
Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Sistem Informasi, Evaluasi, dan Pelaporan yang Efektif Dan Efisien			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Persentase perencanaan berbasis money Follow program	100 %	100 %	100 %
2. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3. Persentase capaian output pelaksanaan perencanaan	90 %	90 %	100 %
4. Peringkat pengelolaan majalah dinas	7	6	-
5. Peringkat pengelolaan Website	10	19	-
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %
Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tatakelola Kepegawaian			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
Persentase implementasi update data kepegawaian secara rutin	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis VI			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang/ Jasa dan Tata Kelola Dokumen			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Persentase Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pengadaan barang dan jasa.	100 %	100 %	100 %
2. Persentase implementasi e-dokumen	100 %	80 %	80 %
3. Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			93,3 %
Sasaran Strategis VII			
Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi Keagamaan			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;	614 org	603 org	98 %
2. Persentase lembaga keagamaan sosial yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.	84 %	71,62 %	85 %
Rata-rata Capaian Kinerja			91,5 %
Sasaran Strategis VIII			
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
Persentase fasilitasi sarana dan prasarana sekretariat bersama FKUB yang memenuhi standar.	80 %	75 %	93,7 %
Rata-rata Capaian Kinerja			93,7 %
Sasaran Strategis IX			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya;	71 lbg	71 lbg	100 %
2. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan.	97 lbg	67 lbg	69 %
Rata-rata Capaian Kinerja			84,5 %

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis X			
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Dana zakat yang terhimpun;	Rp. 7 M	Rp. 6 M	85,7 %
2. Jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan minimal;	10 lbg	10 lbg	100 %
3. Persentase tanah wakaf bersertifikat.	90 %	90 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			95,2 %
Sasaran Strategis XI			
Meningkatnya Mutu/ Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Transparan, Efisien dan Akuntabel			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah jemaah haji yang dilayani;	518 org	518 org	100 %
2. Jumlah pembimbing haji yang bersertifikat.	4 org	4 org	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %
Sasaran Strategis XII			
Meningkatnya Akses Masyarakat Tidak Mampu Terhadap Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Dasar-Menengah			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah siswa MI/Ula yang diberikan KIP;	10083 siswa	7870 siswa	78%
2. Jumlah siswa MTs/Wustha yang diberikan KIP;	3157 siswa	2935 siswa	93%
3. Jumlah siswa MA/Ulya yang diberikan KIP.	2305 siswa	2121 siswa	92%
Rata-rata Capaian Kinerja			87,7%
Sasaran Strategis XIII			
Menurunnya Jumlah Siswa yang Tidak Melanjutkan Pendidikan			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Angka putus sekolah MI/ULA;	0,5%	0,44%	88%
2. Angka putus sekolah MTs / Wustha;	0,5%	0,67%	134%
3. Angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK.	0,5%	0,07%	14%
Rata-rata Capaian Kinerja			78,7%

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis XIV			
Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Persentase pendidikan RA yang terakreditasi minimal B	25%	8,93%	35,7%
2. Persentase Pendidikan MI yang terakreditasi minimal B	70%	42,42%	60,6%
3. Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	70%	50%	71,4%
4. Persentase MA yang terakreditasi minimal B	70%	51,52%	73,6%
5. Rata-rata nilai ujian sekolah MTs/SMTK	5,9%	5,9%	100%
6. Rata-rata nilai ujian sekolah MA/SMATK	7%	6,2%	88,6%
Rata-rata Capaian Kinerja			71,6%
Sasaran Strategis XV			
Meningkatnya Proporsi Pendidik yang Kompeten dan Profesional pada Pendidikan Umum Berciri Khas Agama			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Meningkatnya presentasi guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4	100%	68,4%	68,4%
2. Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi	50%	21,9%	43,8%
Rata-rata Capaian Kinerja			56,1%
Sasaran Strategis XVI			
Meningkatnya Ketersediaan Guru Pendidikan Agama yang Telah Bersertifikat			
Indikator kinerja utama	Target	Capaian	%
1. Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat	80%	45,7%	57,1%
2. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama kristen bersertifikat	100%	36,3%	36,3%
3. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama katolik bersertifikat	10%	6%	60%
Rata-rata Capaian Kinerja			51,1%

Sasaran Strategis XVII			
Meningkatnya Akses Pendidikan Keagamaan Sesuai Aspirasi Umat Beragama			
Sasaran strategis	Target	Capaian	%
1. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam (Diniyah/Pesantren)	6000 santri	5173 siswa	86,2%
2. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen	2000 siswa	2187 siswa	109%
3. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik	245 siswa	283 siswa	115%
4. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha (SMB, Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma)	10 siswa	6 siswa	60%
Rata-rata Capaian Kinerja			92,5%

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari sebuah penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi (capaian) pada masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Kriteria Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Rentang Nilai (Persentase)	Kategori
1	< 50	Kurang
2	50 – 79	Cukup
3	80 – 100	Baik
4	> 100	Sangat Baik

3. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, data kinerja dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman tersebut dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan menggunakan metode konvensional yaitu berdasarkan laporan yang diberikan oleh masing-masing Unit Kerja Teknis (Bidang/ Pembimbing/ Subbag) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Yang Tertib Sesuai Dengan Ketentuan

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja sasaran strategis yang pertama ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 indikator Kinerja Utama, yaitu : (1) persentase penyerapan anggaran, dan (2) persentase penyampaian dokumen LKKA tepat waktu dan tepat jumlah.

Capaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Persentase penyerapan anggaran	90 %	80,23 %	89 %
2. Persentase penyampaian dokumen LKKA tepat waktu dan tepat jumlah	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			94,5 %

Pencapaian serapan indikator pada Kantor Wilayah Kementerian Agama pada tahun 2015 adalah sebesar 94,5 %, dengan kategori **Baik**. Indikator yang dijadikan penilaian pada sasaran strategis ini adalah :

1. Persentase penyerapan anggaran

Pada tahun 2015, Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi anggaran (pagu awal) DIPA sebesar Rp. 90.452.725.000,- yang tersebar dalam 9 program. Namun seiring dengan berjalannya tahun anggaran, terjadi perubahan (revisi) terhadap anggaran yang sudah tersedia. Perubahan (revisi) anggaran tersebut berupa pengurangan dan penambahan terhadap anggaran yang sudah ada, sehingga total pagu DIPA mengalami perubahan, yaitu pengurangan anggaran. Alokasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 setelah mengalami perubahan (revisi) anggaran adalah sebesar Rp. 71.190.469.000, . Dari besaran anggaran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. 57.118.469.778,- atau sebesar 80,23 % dari total anggaran sesudah dilakukan perubahan (revisi) DIPA.

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015
(per Program)

No	Program	Pagu DIPA (Awal) (Rp)	Pagu DIPA (Sesudah Revisi) (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	15.361.065.000,-	16.432.916.000,-	12.322.945.773,-	74,99 %
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	250.000.000,-	250.000.000,-	249.700.000,-	99,88 %
3	Bimbingan Masyarakat Islam	6.690.844.000,-	6.630.715.000,-	6.136.514.473,-	92,55 %
4	Pendidikan Islam	40.972.694.000,-	27.567.854.000,-	20.721.081.389,-	75,16 %
5	Bimbingan Masyarakat Kristen	4.386.658.000,-	4.785.621.000,-	4.533.786.106,-	94,74 %
6	Bimbingan Masyarakat Katolik	15.740.002.000,-	8.248.972.000,-	7.059.067.962,-	85,58 %
7	Bimbingan Masyarakat Hindu	2.432.550.000,-	2.612.259.000,-	2.347.489.112,-	89,86 %
8	Bimbingan Masyarakat Buddha	1.540.171.000,-	1.665.075.000	1.026.903.884,-	61,67 %
9	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	2.808.741.000,-	3.247.057.000,-	2.720.981.079,-	83,80 %
	TOTAL	90.452.725.000,-	71.190.469.778,-	57.118.469.778,-	80,23 %

2. Persentase penyampaian dokumen LKKA tepat waktu dan tepat jumlah.

Selain persentase penyerapan anggaran, salah satu indikator pada sasaran strategis Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Yang Tertib Sesuai Dengan Ketentuan adalah persentase penyampaian dokumen LKKA tepat waktu dan tepat jumlah. Penyampaian dokumen LKKA ditetapkan menjadi salah satu indikator karena dokumen LKKA merupakan salah satu dokumen laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan penyerapan anggaran. Penyampaian dokumen LKKA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan secara periodik, yaitu Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan. Penyampaian dokumen LKKA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dilaksanakan melalui teknologi informasi (aplikasi-aplikasi keuangan) dan pengiriman dokumen secara fisik (*hardcopy*).

Pada tahun 2015, dokumen LKKA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun oleh masing-masing unit teknis pengelola program DIPA, yaitu : (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bagian Tata Usaha); (2) Program Pendidikan Islam (Bidang Pendidikan Islam); (3) Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Program Bimbingan Masyarakat Islam (Bidang Haji dan Bimas Islam); (4) Program Bimbingan Masyarakat Kristen); (5) Program Bimbingan Masyarakat Katolik (Bidang Pendidikan Katolik dan Bidang

Urusan Agama Katolik); (6) Program Bimbingan Masyarakat Hindu (Pembimbing Masyarakat Hindu); dan (7) Program Bimbingan Masyarakat Buddha (Pembimbing Masyarakat Buddha).

2. Meningkatnya Pengelolaan BMN Yang Tertib

Untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu : (1) persentase penyampaian dokumen laporan BMN tepat waktu dan tepat jumlah; dan (2) persentase pengamanan aset BMN

Capaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Persentase penyampaian dokumen laporan BMN tepat waktu dan tepat jumlah	100 %	100 %	100 %
2. Persentase pengamanan aset BMN	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %

- a) Persentase penyampaian dokumen laporan BMN tepat waktu dan tepat jumlah
- b) Persentase pengamanan aset BMN

3. Meningkatnya Tatakelola Organisasi

Untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 4 Indikator Kinerja Utama, yaitu : (1) persentase

penyelesaian TLHP, (2) persentase penurunan temuan oleh audit internal dan eksternal, (3) nilai audit kinerja, dan (4) persentase penyelesaian pengaduan masyarakat.

Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Persentase penyelesaian TLHP (temuan Itjen, BPKP, dan BPK)	75 %	40 %	53,3 %
2. Nilai Audit kinerja	75	67,70	90,3 %
3. Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			74,7 %

1. Persentase Penyelesaian TLHP (Temuan Itjen, BPKP dan BPK)
Indikator kinerja ini memperoleh capaian sebesar 53,3%. Capaian tersebut terdiri dari penyelesaian tindak lanjut hasil audit oleh BPK RI, BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.

a) Hasil pemeriksaan BPK RI

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terdiri dari pemeriksaan atas laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai dengan tahun 2015, jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebanyak rekomendasi, sedangkan yang telah ditindaklanjuti sebanyak rekomendasi atau%.

b) Hasil Audit BPKP

Tindak lanjut hasil audit BPKP terdiri dari hasil audit pada unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bagian/ Bidang/ Pembimbing dan Subbag) dan satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Sampai dengan tahun 2015, jumlah temuan yang harus

ditindaklanjuti sebanyak 147 temuan, sedangkan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 50 temuan sehingga saldo temuan yang masih harus ditindaklanjuti adalah sebanyak 97 temuan.

c) Hasil Audit Inspektorat Jenderal

Tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI terdiri dari hasil audit pada unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bagian/ Bidang/ Pembimbing dan Subbag) dan satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Sampai dengan tahun 2015, jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti sebanyak 628 temuan, sedangkan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 313 temuan sehingga saldo temuan yang masih harus ditindaklanjuti adalah sebanyak 315 temuan.

Pengukuran terhadap indikator peningkatan Tindak Lanjut Hasil Audit ditunjukkan dengan kepatuhan Satuan Kerja dalam menyelesaikan Saran Tindak Lanjut Hasil Audit. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka percepatan Saran Tindak Lanjut antara lain melalui kegiatan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), Pemutakhiran Data TLHP dan lain sebagainya.

2. Nilai Audit Kinerja

Pada tahun 2015, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pertama kalinya menjadi salah satu satuan kerja yang dilakukan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hasil audit kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 adalah sebesar

3. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Sistem Informasi, Evaluasi, dan Pelaporan Yang Efektif Dan Efisien

Untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 5 Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari (1) persentase perencanaan berbasis money follow program, (2) persentase penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu, (3) persentase capaian output pelaksanaan perencanaan, (4) peringkat pengelolaan majalah dinas, dan (5) peringkat pengelolaan website.

Capaian Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Persentase perencanaan berbasis money Follow program	100 %	100 %	100 %
2. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3. Persentase capaian output pelaksanaan perencanaan	95 %	90 %	94,7 %
4. Peringkat pengelolaan majalah dinas	7	6	-
5. Peringkat pengelolaan Website	10	19	-
Rata-rata Capaian Kinerja			98,2 %

Capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan, sistem informasi, evaluasi dan pelaporan yang efektif dan efisien memperoleh nilai 98,2 %. Nilai capaian sasaran ini merupakan hasil pencapaian dari kualitas perencanaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur,

5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tatakelola Kepegawaian

Untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 1 Indikator Kinerja Utama yaitu persentase implementasi update data kepegawaian secara rutin

Capaian Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
Persentase implementasi update data kepegawaian secara rutin	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %

Update data kepegawaian dilakukan secara rutin dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi online yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Update data kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan secara berkala, dengan melihat adanya perubahan-perubahan status kepegawaian dari setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu perubahan pangkat, perubahan tempat kerja, perubahan masa kerja dan lain sebagainya.

Update data kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh operator kepegawaian pada sub bagian ortala dan kepegawaian. Pelaksanaan update data kepegawaian ini langsung dilaksanakan ketika terdapat perubahan-perubahan data kepegawaian berdasarkan surat keputusan.

6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang/ Jasa dan Tata Kelola Dokumen

Untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu : (1) persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen pengadaan barang dan jasa, (2) persentase implementasi e-dokumen, dan (3) persentase peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia.

Capaian Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen pengadaan barang dan jasa	100 %	94,7 %	94,7 %
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia	80 %	80 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			91,6 %

a) Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen pengadaan barang dan jasa

Pada tahun 2015, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi pengadaan sebanyak 38 paket yang tersebar pada unit kerja teknis. Paket pengadaan barang dan jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Rincian paket pengadaan barang dan jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas : 5 paket pengadaan program bimas katolik, 1 paket pengadaan program bimas kristen, 2 paket pengadaan program bimas buddha, 7 paket pengadaan program

bimas islam, 22 paket pengadaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian agama dan 1 paket pengadaan program penyelenggaraan haji dan umrah.

Dari 38 paket pengadaan barang dan jasa yang direncanakan, paket pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan adalah sebanyak 36 paket (97,4 %). paket pengadaan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi paket pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, paket pengadaan kendaraan operasional roda 2, paket pengadaan sarana dan prasarana serta paket pekerjaan pemeliharaan perkantoran.

b) Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia

Peningkatan sarana dan prasarana pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 dilaksanakan melalui penambahan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat beragama yang menjadi obyek pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2015, peningkatan sarana dan prasarana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi : pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, pengadaan perangkat pengolah data serta pengadaan fasilitas ruangan perkantoran, pengadaan kendaraan operasional, pengadaan kendaraan untuk pelayanan.

7. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitas Keagamaan

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu : (1) Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan; dan (2) Persentase lembaga keagamaan sosial yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.

Capaian Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;	614 org	603 org	98 %
2. Persentase lembaga keagamaan sosial yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.	84 %	71,62 %	85 %
Rata-rata Capaian Kinerja			91,5 %

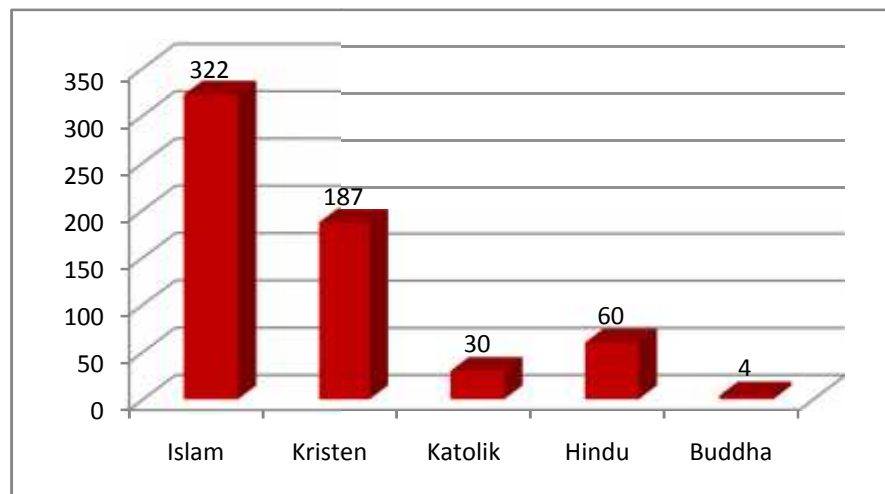
Berdasarkan capaian indikator kinerja utama tersebut di atas, capaian kinerja sasaran strategis 1 dapat dikategorikan Baik, dengan rata-rata persentase adalah sebesar 91,5%, dengan persentase capaian indikator kinerja utama 1 adalah 98% (Baik) dan capaian indikator kinerja utama 2 adalah 85% (Baik).

- a. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

Pada indikator kinerja utama yang pertama ini memperoleh capaian kinerja sebesar 98 %. Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui pelaksanaan Pemberian bantuan kepada penyuluh agama non PNS sebanyak 603 orang. Pemberian bantuan kepada penyuluh agama non PNS ini dimaksudkan untuk

menunjang pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan agama kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para penyuluh agama non PNS, sehingga pelaksanaan tugas kepenyuluhan berjalan lebih baik sehingga umat yang diberikan penyuluhan dapat memperoleh lebih banyak informasi keagamaan. Dengan bertambahnya informasi keagamaan diharapkan akan berpengaruh pada semakin rukunnya kehidupan beragama. Pemberian bantuan kepada penyuluh agama non PNS yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur ini melibatkan penyuluh agama non PNS semua agama, yang terdiri dari : (1) penyuluh agama non PNS Islam 322 orang; (2) penyuluh agama non PNS Katolik 30 orang; (3) penyuluh agama non PNS Kristen 187 orang; (4) penyuluh agama non PNS Hindu 60 orang; dan (5) penyuluh agama non PNS Buddha 4 orang.

Persentase pemberian bantuan kepada penyuluh agama non PNS dapat dilihat pada grafik berikut :



- b. Persentase lembaga keagamaan sosial yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya

Persentase lembaga keagamaan sosial yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya mendapatkan capaian kinerja sebesar 85 %. Peningkatan mutu lembaga keagamaan dilaksanakan melalui pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan. Pada tahun 2015, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga yang terdiri dari : lembaga keagamaan islam, 7 lembaga keagamaan katolik, lembaga keagamaan kristen, dan 6 lembaga keagamaan hindu. Pemberian bantuan peningkatan mutu lembaga keagamaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada umat beragama yang dilaksanakan oleh setiap lembaga keagamaan, sehingga kualitas pemahaman keagamaan dan keimanan umat beragama diharapkan meningkat.

8. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Yang menjadi indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah Persentase fasilitasi sarana dan prasarana sekretariat bersama FKUB yang memenuhi standar. Capaian kinerja indikator tersebut ditandai dengan pemberian bantuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana sekretariat bersama FKUB, sehingga memenuhi standar.

Capaian Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
Persentase fasilitasi sarana dan prasarana sekretariat bersama FKUB yang memenuhi standar.	80 %	75 %	93,7 %
Rata-rata Capaian Kinerja			93,7 %

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis ini masuk dalam kategori Baik, dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 93,75%. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sekretariat bersama FKUB yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 melalui kegiatan : (1) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dengan dukungan dana sebesar Rp. 451.180.000,- yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan kepada forum KUB dalam bentuk bantuan dana, pemberian honor Tim Kerukunan, pelaksanaan rapat koordinasi lintas kerukunan, dialog kerukunan umat beragama di media (TV), dan pertemuan pembina kerukunan. (2) Kegiatan Pembinaan Administrasi Kerukunan Umat Beragama dengan dukungan dana sebesar Rp. 111.200.000,- yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan kepada Forum Perempuan Lintas Agama (PELITA), bantuan Forum Kerukunan Lintas Agama, pembayaran honor Tim Verifikasi Lokasi Konflik, pembayaran hinir validasi data KUB dan pembayaran honor tim verifikasi kasus hukum.

9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis ini adalah peningkatan kualitas fasilitas keagamaan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas keagamaan masyarakat, seperti rumah ibadah dan KUA. Peningkatan kualitas fasilitas keagamaan ini dimaksudkan agar setiap fasilitas keagamaan yang digunakan oleh masyarakat dapat memenuhi standar pelayanan.

Capaian Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya;	71 lbg	70 lbg	98,6 %
2. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan.	97 lbg	67 lbg	69 %
Rata-rata Capaian Kinerja			84,5 %

Pada indikator pertama, yaitu Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya, capaian kinerjanya dikategorikan Baik, dengan jumlah capaian sebanyak 70 lembaga dari target awal sebanyak 71 lembaga, sehingga persentase capaiannya sebesar 98,6 %. Sedangkan untuk indikator kedua, yaitu Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan, capaian kinerjanya masuk dalam kategori Cukup, dengan persentase capaiannya sebesar 69%, dengan rincian dari target peningkatan standar pelayanan KUA sebanyak 97 lembaga hanya terlaksana sebanyak 67 lembaga.

Pemberian bantuan peningkatan kualitas rumah ibadah ini bertujuan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas fisik rumah ibadah (kualitas fisik/ bangunan). Hal tersebut diharapkan akan mempengaruhi semangat umat beragama untuk beribadah dan berkarya dalam masyarakat yang kesemuanya itu akan bermuara pada peningkatan kualitas iman keagamaan umat beragama.

Pemberian bantuan kepada rumah ibadah ini meliputi :

- Rumah ibadah agama islam sebanyak 14 lokasi;
- Rumah ibadah agama katolik sebanyak 8 lokasi;
- Rumah ibadah agama kristen protestan sebanyak 43 lokasi; dan
- Rumah ibadah agama hindu sebanyak 5 lokasi.

10. Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Sasaran strategis ini memiliki 3 indikator kinerja, yaitu : pengumpulan dana zakat, peningkatan jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan dan peningkatan persentase tanah wakaf yang bersertifikat. Pada indikator kinerja utama yang pertama, yaitu Dana zakat yang terhimpun, tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 85,7%, yaitu dari target dana zakat yang terhimpun sebesar Rp. 7 M, dapat terkumpul dana zakat sebesar Rp. 6 M. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator lainnya tingkat capaian kinerjanya masing-masing mencapai 100%, yaitu capaian jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan dari target 10 lembaga, terlaksana sebanyak 10 lembaga dan persentase tanah wakaf bersertifikat dari target 90% terlaksana sebanyak 90%.

Sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ke 4 ini masuk dalam kategori Baik dengan rata-rata capaian sebesar 95,2%

Capaian Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Dana zakat yang terhimpun;	Rp. 7 M	Rp. 6 M	85,7 %
2. Jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan minimal;	10 lgb	10 lgb	100 %
3. Persentase tanah wakaf bersertifikat.	90 %	90 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			95,2 %

11. Meningkatkan Mutu/ Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Transparan, Efisien dan Akuntabel

Capaian kinerja pada strategis ini dinilai masuk dalam kategori Baik, dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %. Dari 2 indikator

kinerja utama yang ditetapkan pada sasaran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat meraih capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Untuk indikator pertama, yaitu jumlah jemaah haji yang dilayani, dari target yang telah ditetapkan sebesar 518 orang, dapat terpenuhi dengan melayani pemberangkatan jemaah haji sebanyak 518 orang. Sedangkan pada indikator kinerja utama, yaitu jumlah pembimbing haji yang bersertifikat, dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 4 orang, dapat dicapai sebanyak 4 orang.

Capaian Sasaran Strategis 11

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah jemaah haji yang dilayani;	518 org	518 org	100 %
2. Jumlah pembimbing haji yang bersertifikat.	4 org	4 org	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %

12. Meningkatnya Akses Masyarakat Mampu Terhadap Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Dasar – Menengah

Pada sasaran ini, yang menjadi indikator kinerja adalah pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa/i madrasah untuk semua tingkatan. Capaian rata-rata dari sasaran strategis ini adalah sebesar 87,7% (Baik) dengan masing-masing capaian indikator adalah jumlah siswa MI/ Ula penerima KIP sebesar 78%, jumlah siswa MTs/ Wustha penerima KIP adalah sebesar 93% dan jumlah siswa MA/ Ulya penerima KIP adalah sebesar 92%.

Capaian Sasaran Strategis 12

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah siswa MI/Ula yang diberikan KIP;	10083 siswa	7870 siswa	78%
2. Jumlah siswa MTs/Wustha yang diberikan KIP;	3157 siswa	2935 siswa	93%
3. Jumlah siswa MA/Ulya yang diberikan KIP.	2305 siswa	2121 siswa	92%
Rata-rata Capaian Kinerja			87,7%

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini tidak memenuhi target karena berbasis kartu, di mana jumlah kuota dan basis kartu tidak sesuai dengan jumlah yang direncanakan. Syarat pembayaran berbasis Kartu Indonesia Pintar (KIP), sementara ketersediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak sesuai dengan kuota pada DIPA, sehingga diusulkan percetakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke Kementerian Agama RI (sedang diproses).

13. Menurunnya Jumlah Siswa yang Tidak Melanjutkan Pendidikan

Pada sasaran ini, yang menjadi indikator kinerja adalah berkurangnya jumlah angka putus sekolah pada sekolah/ madrasah. Capaian kinerja pada sasaran kinerja ini adalah sebesar 78,7% (Cukup).

Capaian Sasaran Strategis 13

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Angka putus sekolah MI/Ula;	0,5%	0,44%	88%
2. Angka putus sekolah MTs / Wustha;	0,5%	0,67%	134%
3. Angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK.	0,5%	0,07%	14%
Rata-rata Capaian Kinerja			78,7%

Pada indikator yang pertama, capaian tidak memenuhi target karena alasan kemiskinan, sementara siswa dimaksud tidak memiliki KIP. Di

samping itu beberapa Madrasah yang masih memberlakukan naik dan tidak naik kelas dan alasan kemiskinan. Dilakukan penyisiran pada Madrasah-madrasah dimaksud dan dilakukan sosialisasi tentang wajib belajar dan Program Indonesia Pintar (PIP). Sedangkan pada indikator yang kedua, capaian melebihi target yang ditandai dengan adanya dukungan Kepala Madrasah yang baik dalam Tatanan Sosialisasi.

Pada indikator yang ketiga, capaian tidak memenuhi target karena alasan tingkat pemahaman tentang Pendidikan Universal pada Jenjang Madrasah Aliyah belum baik dan merata dan biaya pendidikan masuk MA yang mahal. Perlu dilakukan sosialisasi tentang Pendidikan Universal dan Program Indonesia Pintar (PIP).

14. Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas sarana satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Peningkatan kualitas sarana satuan pendidikan ini meliputi satuan pendidikan yang sudah berstatus negeri maupun swasta, dengan berbagai tingkatan, mulai satuan pendidikan dasar hingga satuan pendidikan menengah.

Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 71,65% dengan kategori penilaian **Cukup**.

Capaian Sasaran Strategis 14

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Persentase pendidikan RA yang terakreditasi minimal B	25%	8,93%	35,7%
2. Persentase Pendidikan MI yang terakreditasi minimal B	70%	42,42%	60,6%
3. Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	70%	50%	71,4%
4. Persentase MA yang terakreditasi minimal B	70%	51,52%	73,6%
5. Rata-rata nilai ujian sekolah MTs/ SMPTK	5,9%	5,9%	100%
6. Rata-rata nilai ujian sekolah MA/ SMATK	7%	6,2%	88,6%
Rata-rata Capaian Kinerja			71,6%

Capaian indikator kinerja utama yang terkait dengan proses akreditasi lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur (indikator kinerja utama 1 s.d. 4) tidak memenuhi target karena kegiatan akreditasi pada RA/ madrasah dilaksanakan hanya 1 kali dalam setahun. Selain itu alokasi anggaran untuk pelaksanaan akreditasi untuk RA/ madrasah sangat terbatas sehingga jumlah RA/ madrasah yang diakreditasi mengalami penurunan dari jumlah yang direncanakan sebelumnya. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga RA/ madrasah karena kualitas pengelolaan belum mendapat jaminan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD PNF) dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP S/M).

15. Meningkatnya Proporsi Pendidik yang Kompeten dan Profesional pada Pendidikan Umum Berciri Khas Agama

Peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya kualitas lulusan yang dihasilkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik tersebut, Kementerian Agama menetapkan sasaran strategis ini, sehingga dapat menjadi perhatian bagi seluruh satuan kerja.

Capaian indikator kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 56,1% dengan kategori **Cukup**.

Capaian Sasaran Strategis 15

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Meningkatnya presentasi guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4	100%	68,4%	68,4%
2. Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi	50%	21,9%	43,8%
Rata-rata Capaian Kinerja			56,1%

Capaian indikator kinerja yang pertama tidak memenuhi target karena Program Beasiswa Pendidikan S1 bagi Guru RA-Madrasah melalui program Dual Mood Sistem (DMS) sudah tidak dilaksanakan lagi oleh Kementerian Agama RI. Selain itu, Perguruan Tinggi Agama Islam yang akan mengakomodir guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam tidak tersedia di Kab./ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. yang ada dan satu-satunya di NTT yaitu Universitas Muhammadiyah yang ada di Kupang. Karena belum terpenuhinya kualifikasi minimal S1/ D4 bagi guru RA dan Madrasah yang mengakibatkan mereka tidak memiliki kelayakan menjadi guru dan selanjutnya harus dialihfungsikan menjadi JFU bagi mereka yang

berstatus PNS, sedangkan yang Non PNS harus diberhentikan dengan hormat dari Jabatan guru. Hal ini membawa dampak pada RA dan Madrasah mengalami kekurangan tenaga guru yang sangat besar jumlahnya.

Capaian indikator kinerja yang kedua tidak memenuhi target karena pelaksanaan sertifikasi dilakukan hanya 1 kali dalam setahun, selain itu kuota peserta sertifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI tidak sesuai dengan jumlah yang diusulkan dari Provinsi, sementara jumlah guru yang memenuhi syarat untuk ikut sertifikasi masih sangat banyak. Karena masih banyak guru yang belum tersertifikasi mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dikalangan guru karena terdapat kesenjangan kesejahteraan dari para guru yang juga berdampak pula pada penurunan kinerja guru.

16. Meningkatnya Ketersediaan Guru Pendidikan Agama yang Telah Bersertifikat

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas lulusan siswa adalah dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik (guru). Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran bahwa kualitas tenaga pendidik (guru) sudah meningkat adalah bahwa tenaga pendidik (guru) tersebut telah mempunyai sertifikat tenaga pendidik (guru) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator pada sasaran strategis ini adalah sebesar 51,1% dengan kategori capaian adalah **Cukup**.

Capaian Sasaran Strategis 16

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat	80%	45,7%	57,1%
2. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama kristen bersertifikat	100%	36,3%	36,3%
3. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama katolik bersertifikat	10%	6%	60%
Rata-rata Capaian Kinerja			51,1%

Capaian indikator utama sasaran strategis ini tidak memenuhi target karena pelaksanaan sertifikasi dilakukan hanya 1 kali dalam setahun, selain itu kuota peserta sertifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI tidak sesuai dengan jumlah yang diusulkan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, sementara jumlah guru yang memenuhi syarat untuk ikut sertifikasi masih sangat banyak. Karena masih banyak guru yang belum tersertifikasi mengakibatkan terjadinya kecemburuan social dikalangan guru karena terdapat kesenjangan kesejahteraan dari para guru yang juga berdampak pula pada penurunan kinerja guru. Di samping itu syarat-syarat pendaftaran sertifikasi yang kurang dipahami oleh guru pendidikan agama dan sebagian guru pendidikan agama belum mengetahui bahwa syarat untuk pendaftaran sertifikasi harus aktif di SIMPATIKA (pemanfaatan teknologi informasi terkini yang lebih cepat, mudah, akurat, akuntabel dan berkesinambungan).

17. Meningkatnya Akses Pendidikan Keagamaan Sesuai Aspirasi Umat Beragama

Kinerja indikator pada sasaran strategis ini adalah pada peningkatan jumlah peserta didik secara kuantitatif. Capaian kinerja indikator pada sasaran strategis ini adalah sebesar 92,5% dengan kategori **Baik**.

Capaian Sasaran Strategis 17

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam (Diniyah/Pesantren)	6000 santri	5173 siswa	86,2%
2. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen	2000 siswa	2187 siswa	109%
3. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik	245 siswa	283 siswa	115%
4. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha (SMB, Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma)	10 siswa	6 siswa	60%
Rata-rata Capaian Kinerja			92,5%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas, terlihat bahwa pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah sebesar 86,2 % dengan kategori pencapaian adalah **Baik**

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	94,5 %
2. Meningkatnya pengelolaan BMN yang tertib	100 %
3. Meningkatnya tatakelola organisasi	74,7 %
4. Meningkatnya kualitas perencanaan, Sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien	100 %
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tatakelola kepegawaian	100 %
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang/jasa dan tata kelola dokumen	93,3 %
7. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan	91,5 %
8. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	93,7 %
9. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	84,5 %
10. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	95,2 %
11. Meningkatnya mutu/ kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien dan akuntabel	100 %
12. Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah	87,7 %
13. Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan	78,7 %
14. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan	71,6 %
15. Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama	56,1 %
16. Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat	51,1 %
17. Meningkatnya Akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama	92,5 %
Rata-rata Capaian Kinerja	86,2 %

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan melalui program dan kegiatan, diperlukan berbagai dukungan sumber daya, termasuk salah satunya adalah dukungan anggaran. Anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timurberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 71.190.469.000,- dengan rincian (per satker) :

NO	NAMA SATKER	PAGU (Rp.)
1	Sekretariat Jenderal	16.432.916.000,-
2	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	6.630.715.000,-
3	Ditjen Pendidikan Islam	27.567.854.000,-
4	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	4.785.621.000,-
5	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	8.248.972.000,-
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	2.612.259.000,-
7	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	1.665.075.000,-
8	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3.247.057.000,-
TOTAL		71.190.469.000,-

2. Realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 57.118.469.778,- atau sebesar 80,23 % dari pagu anggaran yang tersedia, dengan rincian adalah sebagai berikut :

Bab III Akuntabilitas Kinerja

NO	NAMA SATKER	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			ANGGARAN (Rp.)	%
1	Sekretariat Jenderal	16.432.916.000,-	12.572.645.773,-	76,51
2	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	6.630.715.000,-	6.136.514.473,-	92,55
3	Ditjen Pendidikan Islam	27.567.854.000,-	20.721.081.389,-	75,16
4	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	4.785.621.000,-	4.533.786.106,-	94,74
5	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	8.248.972.000,-	7.059.067.962,-	85,58
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	2.612.259.000,-	2.347.489.112,-	89,86
7	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	1.665.075.000,-	1.026.903.884,-	61,67
8	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3.247.057.000,-	2.720.981.079,-	83,80
TOTAL		71.093.506.000,-	57.118.469.778,-	80,23

BAB IV PENUTUP

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 seperti yang sudah dikemukakan pada bab terdahulu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas amanah yang telah diberikan oleh Kementerian Agama RI kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikategorikan **Cukup Baik**, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 79,6% dengan persentase serapan anggaran sebesar 79,10%.

Diharapkan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 ini dapat memberikan sumbangan secara umum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui upaya peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak.